

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif, dimulai dari tahapan persiapan, pembentukan tim, penyusunan rancangan awal, hingga penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD. Penyusunan ini dilandaskan pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), RKP nasional, serta masukan dari berbagai pihak, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil Musrenbang.
2. RKPD memiliki peran strategis sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD. Proses ini mengedepankan prinsip kolaboratif dan berbasis bukti (evidence-based planning), walaupun masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan kualitas dokumen.

#### **5.2 Saran**

1. Peningkatan Kualitas dan integritas

Perlu dibangun sistem data terpadu antar OPD yang real-time, akurat, dan mudah diakses. Pembentukan unit khusus data development dan penguatan kolaborasi dengan BPS serta lembaga riset juga penting dilakukan.

## 2. Penguatan Koordinasi Antar OPD

Lakukan pelatihan terpadu lintas OPD terkait peran strategis mereka dalam penyusunan RKPD. Pembentukan forum rutin antar perencana OPD juga dapat meningkatkan sinergi dan keterpaduan program.

## 3. Pengembangan Kapasitas SDM Perencana

Adakan pelatihan dan sertifikasi perencana secara berkala, khususnya dalam analisis data, metode perencanaan, dan pemanfaatan aplikasi e-Planning. Penambahan tenaga perencana juga perlu dipertimbangkan.

## 4. Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan

Diperlukan mekanisme komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional. Sinkronisasi harus dilakukan sejak awal antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui forum perencanaan tematik.

## 5. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran

Prioritaskan program berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi serta pertimbangan dampak strategisnya. Upayakan alternatif pembiayaan melalui kemitraan publik-swasta (PPP) atau sumber dana luar negeri.

## 6. Penguatan Partisipasi Publik

Lakukan edukasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan. Tingkatkan peran serta lembaga masyarakat sipil dan akademisi dalam proses Musrenbang agar partisipasi lebih substansial dan tidak sekadar formalitas.

#### 7. Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Optimal

Tingkatkan pelatihan penggunaan e-Planning di seluruh OPD. Pemerintah juga perlu menginvestasikan perbaikan infrastruktur digital, terutama di daerah dengan akses internet terbatas.

